

## POLICY BRIEF

# PENGUATAN PARTISIPASI ASN DALAM PROGRAM KOMPONEN CADANGAN (KOMCAD)



### DITUJUKAN KE

- Kementerian Pertahanan • LAN • Sekretariat Presiden
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

## Penguatan Partisipasi ASN dalam Program Komponen Cadangan (Komcad)

### Executive Summary

Program Komponen Cadangan (Komcad) merupakan bagian dari strategi pertahanan semesta yang semakin relevan di tengah dinamika global yang ditandai oleh meningkatnya ancaman non-konvensional seperti serangan siber, konflik geopolitik, dan disrupsi sosial-ekonomi. Dalam konteks tersebut, keterlibatan ASN menjadi penting karena posisinya sebagai aparatur negara sekaligus bagian dari sumber daya manusia strategis nasional. Hasil survei terhadap 3.906 ASN menunjukkan bahwa secara persepsi, Komcad telah memiliki legitimasi yang kuat, dimana 83,4% ASN menilai program ini penting dan 87,5% meyakini kontribusinya terhadap peningkatan nasionalisme.

Namun demikian, dukungan tersebut belum bertransformasi menjadi partisipasi nyata. Tingkat minat ASN untuk mengikuti Komcad hanya mencapai 55,8%, sementara 48,2% lainnya masih belum berminat. Kesenjangan ini menunjukkan adanya *policy conversion gap*, yaitu kondisi ketika penerimaan terhadap kebijakan tidak diikuti oleh tindakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya dukungan institusional, tercermin dari 66,1% ASN yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi, serta masih tingginya persepsi risiko, dimana 91,4% ASN menilai Komcad menuntut kesiapan fisik dan mental dan sekitar 50% mengkhawatirkan dampaknya terhadap keselamatan dan pekerjaan.

Dalam merespons permasalahan tersebut, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditempuh. Pendekatan pertama adalah memperkuat sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman ASN, namun pendekatan ini cenderung tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku. Pendekatan kedua adalah pemberian insentif individual, seperti penghargaan atau tambahan manfaat, namun berisiko menciptakan motivasi jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Alternatif yang lebih strategis adalah mengintegrasikan Komcad ke dalam sistem manajemen ASN, sehingga program ini menjadi bagian dari mekanisme pengembangan kompetensi, kinerja, dan karier ASN.

Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi kebijakan yang paling tepat adalah memperjelas skema penghargaan dan manfaat bagi ASN yang mengikuti Program Komcad. Pendekatan ini menempatkan Komcad tetap sebagai program sukarela, namun didukung oleh sistem insentif yang kuat dan terarah. Pemberian penghargaan dapat berupa pengakuan dalam pengembangan karier, prioritas dalam promosi jabatan, maupun nilai tambah dalam penilaian kinerja, sehingga memberikan kepastian manfaat bagi ASN yang berpartisipasi. Pada saat yang sama, untuk menjaga kualitas dan eksklusivitas program, diperlukan pengetatan kriteria seleksi peserta Komcad agar program ini tidak hanya terbuka, tetapi juga memiliki standar kompetensi dan kesiapan yang jelas bagi peserta. Dengan pendekatan ini, kebijakan tidak hanya mendorong partisipasi, tetapi juga membangun persepsi bahwa Komcad merupakan program strategis dan bernilai tinggi, sehingga mampu mengubah dukungan ASN yang sudah kuat menjadi keterlibatan nyata secara berkelanjutan.

## PENDAHULUAN

Dalam konteks global, karakter ancaman terhadap negara telah mengalami perubahan signifikan. Ancaman tidak lagi hanya bersifat konvensional (militer), tetapi juga berkembang ke arah ancaman non-konvensional seperti serangan siber, disinformasi digital, konflik geopolitik, dan perang hibrida.

Data global menunjukkan peningkatan signifikan serangan siber terhadap sektor publik. Data Kaspersky (2025/2026) menunjukkan sector pemerintah konsisten menjadi target kejahatan siber selama dua tahun berturut turut, mencakup 19% dari total insiden tingkat keparahan tinggi.

Dalam konteks global, karakter ancaman terhadap negara telah mengalami perubahan signifikan. Ancaman tidak lagi hanya bersifat konvensional (militer), tetapi juga berkembang ke arah ancaman non-konvensional seperti serangan siber, disinformasi digital, konflik geopolitik, dan perang hibrida.

Data global menunjukkan peningkatan signifikan serangan siber terhadap sektor publik. Data Kaspersky (2025/2026) menunjukkan sector pemerintah konsisten menjadi target kejahatan siber selama dua tahun berturut turut, mencakup 19% dari total insiden tingkat keparahan tinggi. Di Indonesia sendiri, serangan terhadap sistem pemerintahan, kebocoran data, dan penyebaran hoaks telah menjadi tantangan nyata dalam menjaga stabilitas nasional.

Di sisi lain, dinamika geopolitik global seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, serta eskalasi konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia sipil. Dalam konteks ini, Komponen Cadangan menjadi relevan sebagai strategi untuk memperkuat kapasitas pertahanan negara secara luas. ASN sebagai bagian dari sistem pemerintahan memiliki posisi strategis karena tidak hanya berperan dalam administrasi negara, tetapi juga sebagai agen stabilitas sosial dan nasional.

Namun demikian, efektivitas kebijakan Komcad sangat bergantung pada tingkat partisipasi ASN. Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun ASN secara umum memiliki persepsi positif terhadap Komcad, partisipasi aktual masih belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam desain dan implementasi kebijakan yang perlu dianalisis lebih lanjut.



## DESKRIPSI MASALAH

Beberapa Permasalahan yang muncul hasil survei persepsi kesiapan ASN dalam keikutsertaan program komponen cadangan ini diantaranya:

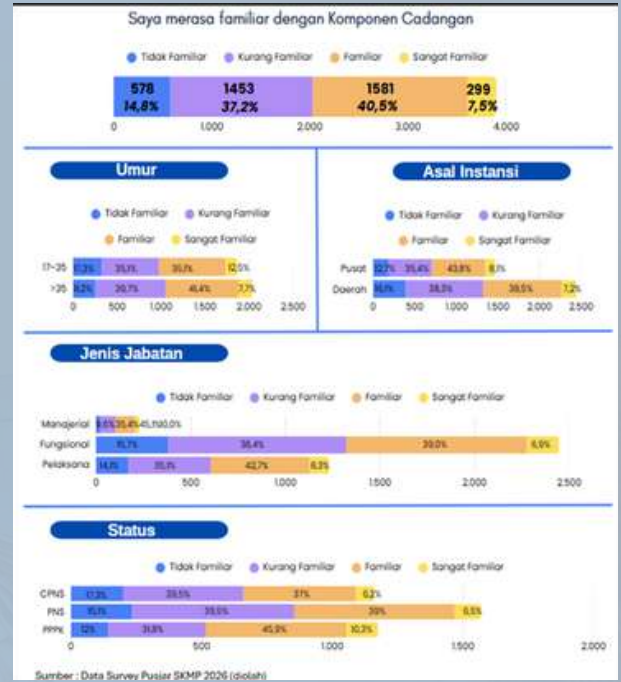
### PERMASALAHAN PERTAMA

Dari sisi pemahaman, terlihat bahwa ASN belum memiliki gambaran yang utuh mengenai Komcad. Meskipun hampir setengah responden (47,9%) merasa familiar, hanya sebagian kecil (7,5%) yang benar-benar memahami secara mendalam. Lebih mengkhawatirkan lagi, sumber informasi utama ASN justru berasal dari media sosial

### LANJUTAN PERMASALAHAN PERTAMA

(59,8%), bukan dari kanal resmi pemerintah. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa 66,1% ASN menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari instansinya. Ketimpangan juga terlihat jelas antara pusat dan daerah, dimana ASN di daerah lebih banyak yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi (70,8%) dibandingkan pusat (58%). Bahkan pada level jabatan, kelompok manajerial justru memiliki tingkat ketidakterpaparan tertinggi (70,7%). Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi komunikasi kebijakan di dalam organisasi belum berjalan efektif, bahkan di level pimpinan.

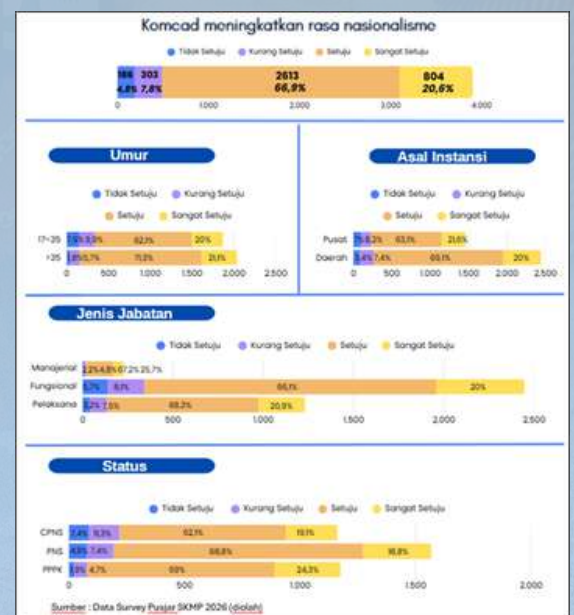
### PEMAHAMAN KOMCAD



### PERMASALAHAN KEDUA

Terdapat fenomena yang cukup menarik, yaitu adanya kesenjangan antara persepsi dan tindakan. Secara umum, ASN memiliki pandangan yang sangat positif terhadap Komcad. Lebih dari 80% responden menyatakan bahwa Komcad penting dan berkontribusi terhadap peningkatan nasionalisme. Namun, ketika ditarik ke level tindakan, minat untuk berpartisipasi hanya berada di angka 55,8%, sementara 48,2% lainnya masih belum berminat. Ini menunjukkan bahwa penerimaan secara nilai (*value acceptance*) tidak otomatis berujung pada tindakan nyata (*behavioral action*). Dengan kata lain, ASN setuju secara prinsip, tetapi belum tentu siap untuk terlibat.

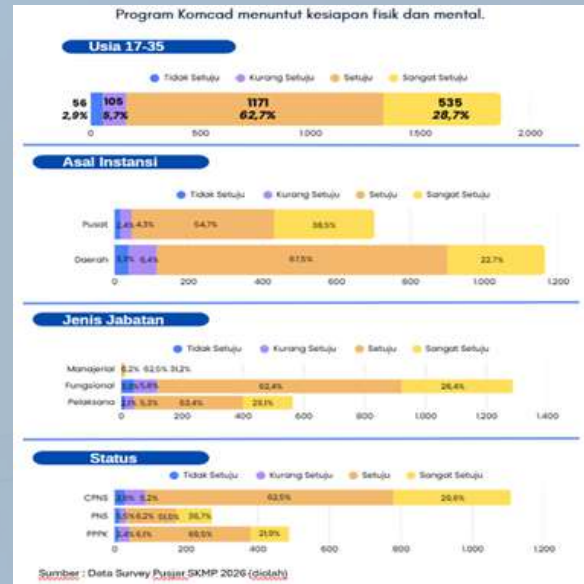
### RELEVANSI DAN MANFAAT KOMCAD



### PERMASALAHAN KETIGA

Hal ini tidak lepas dari persepsi risiko yang cukup tinggi. Sebanyak 91,4% ASN menilai bahwa Komcad menuntut kesiapan fisik dan mental yang berat. Selain itu, sekitar 50% ASN juga memiliki kekhawatiran terkait risiko keselamatan, serta potensi gangguan terhadap pekerjaan dan karier. Menariknya, persepsi ini relatif konsisten di semua kelompok usia, baik 17–35 maupun di atas 35 tahun. Artinya, kekhawatiran ini bukan disebabkan oleh faktor generasi, melainkan karena belum adanya kejelasan informasi dan jaminan dari sisi kebijakan.

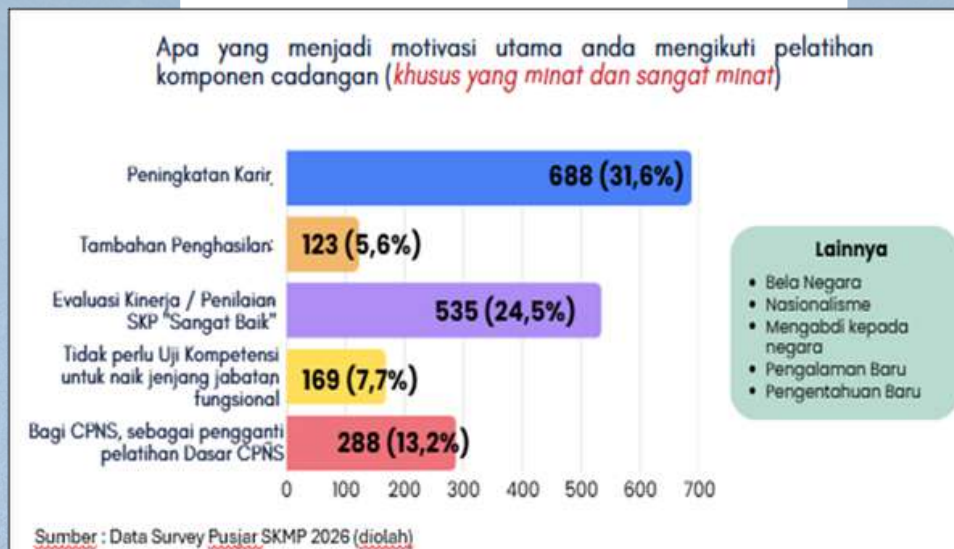
### RISIKO DAN TUNTUTAN PROGRAM



### PERMASALAHAN KEEMPAT

Dari sisi motivasi, terlihat bahwa ASN cenderung bersikap rasional dan pragmatis. Alasan utama mengikuti Komcad bukan didorong oleh nilai-nilai nasionalisme, melainkan oleh faktor instrumental seperti peningkatan karier (31,6%), penilaian kinerja/SKP (24,5%), dan kebutuhan administratif seperti CPNS (13,2%). Hal ini menunjukkan bahwa ASN membedakan antara apa yang mereka yakini penting dan apa yang mendorong mereka untuk bertindak.

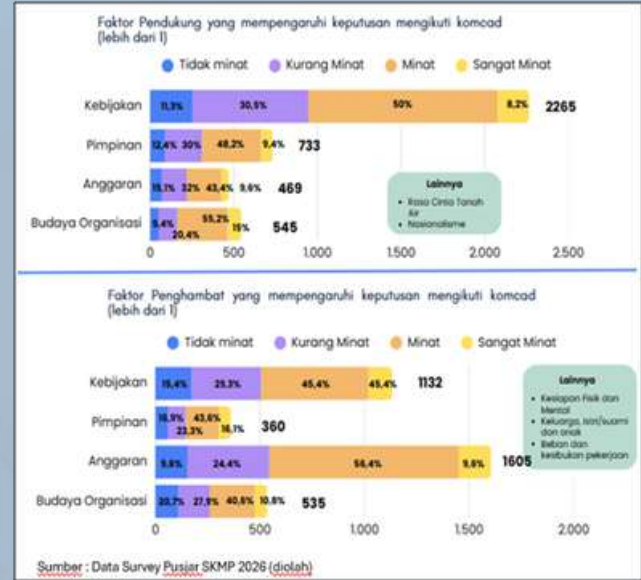
### MOTIVASI TERHADAP PROGRAM



### PERMASALAHAN KELIMA

Faktor institusional menjadi kunci utama yang menjelaskan seluruh fenomena ini. Kebijakan, pimpinan, dan anggaran muncul sebagai faktor pendorong utama, namun pada saat yang sama juga menjadi penghambat. Sebagai contoh, kebijakan menjadi pendorong dengan 50% responden menyatakan minat, namun juga menjadi penghambat bagi 45,4% responden. Anggaran bahkan menjadi hambatan terbesar (56,4%). Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada keberadaan faktor tersebut, tetapi pada bagaimana kualitas implementasinya di lapangan. Dengan kata lain, sistem yang seharusnya mendorong partisipasi justru belum bekerja secara optimal.

### MINAT DAN DUKUNGAN



Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, pendekatan kebijakan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan beberapa alternatif yang saling melengkapi, dengan mempertimbangkan karakteristik ASN dan kondisi kelembagaan saat ini.

**Alternatif pertama** adalah pendekatan berbasis peningkatan pemahaman melalui sosialisasi yang lebih intensif. Pendekatan ini berangkat dari fakta bahwa mayoritas ASN belum mendapatkan informasi yang memadai. Dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan sosialisasi, baik melalui pelatihan, kampanye internal, maupun media digital. Diharapkan ASN memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme Komcad. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan jika berdiri sendiri, karena data menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya kurangnya informasi, tetapi juga tidak adanya dorongan sistemik untuk bertindak.

**Alternatif kedua** adalah pendekatan berbasis insentif selektif melalui pemberian penghargaan dan manfaat yang jelas bagi ASN yang mengikuti Komcad. Mengingat hasil survei menunjukkan bahwa motivasi ASN lebih bersifat rasional dan terkait dengan pengembangan karier, seperti peningkatan karier (31,6%) dan penilaian kinerja/SKP (24,5%), maka kebijakan perlu diarahkan pada pemberian manfaat konkret yang dapat dirasakan langsung. Bentuk penghargaan dapat berupa prioritas dalam promosi jabatan, pengakuan dalam sistem pengembangan kompetensi, maupun nilai tambah dalam penilaian kinerja. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena tidak mengubah sifat dasar Komcad sebagai program sukarela, namun tetap mampu mendorong partisipasi melalui mekanisme insentif. Selain itu, untuk menjaga kualitas program, pendekatan ini juga perlu diiringi dengan pengetatan seleksi peserta, sehingga Komcad tidak hanya menjadi program terbuka, tetapi juga memiliki standar yang tinggi dan dipersepsikan sebagai program strategis yang prestisius.

**Alternatif ketiga** adalah pendekatan mitigasi risiko. Data menunjukkan bahwa persepsi risiko menjadi salah satu penghambat utama. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kejelasan terkait aspek keselamatan, jaminan karier, serta mekanisme pelaksanaan yang tidak mengganggu tugas utama ASN. Jika risiko ini dapat dikurangi atau dijelaskan dengan baik, maka hambatan psikologis ASN akan berkurang secara signifikan.

Alternatif keempat adalah pendekatan penguatan institusi dan kepemimpinan. Mengingat lemahnya peran pimpinan dalam sosialisasi (terlihat dari tingginya angka "tidak pernah" pada jabatan manajerial), maka diperlukan intervensi pada level organisasi.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan yang paling tepat berdasarkan hasil survei ini adalah memperkuat skema penghargaan dan manfaat bagi ASN yang mengikuti Program Komponen Cadangan (Komcad), dengan tetap mempertahankan prinsip sukarela sebagai dasar program. Temuan menunjukkan bahwa ASN pada dasarnya tidak menolak program ini, dengan hasil survei lebih dari 80% menilai Komcad penting, namun belum terdorong untuk berpartisipasi (minat baru 55,8%) akibat lemahnya insentif yang dirasakan, minimnya sosialisasi (66,1% tidak pernah mendapat sosialisasi), serta tingginya persepsi risiko (lebih dari 90% menilai tuntutan fisik dan mental berat). Dalam konteks ini, pendekatan yang paling efektif memberikan nilai tambah yang jelas bagi ASN yang berpartisipasi. Penghargaan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk prioritas pengembangan karier, peluang promosi jabatan, serta pengakuan dalam sistem penilaian kinerja. Pendekatan ini selaras dengan karakteristik ASN yang rasional dan berorientasi pada manfaat konkret, sebagaimana tercermin dalam motivasi utama mengikuti Komcad yang didominasi oleh faktor karier dan kinerja. Di sisi lain, untuk menjaga kualitas dan kredibilitas program, perlu dilakukan pengetatan kriteria seleksi peserta, sehingga Komcad tidak hanya menjadi program partisipatif, tetapi juga program strategis yang memiliki standar tinggi. Dengan demikian, Komcad dapat diposisikan sebagai program yang bernilai, prestisius, dan memberikan dampak nyata, baik bagi individu ASN maupun bagi sistem pertahanan negara secara keseluruhan. Pada akhirnya, kunci peningkatan partisipasi ASN bukan terletak pada paksaan atau kewajiban, melainkan pada kemampuan kebijakan dalam menciptakan keseimbangan antara insentif, kepastian manfaat, dan kualitas program, sehingga mampu mengubah dukungan yang sudah tinggi menjadi partisipasi yang nyata dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1991). Social Cognitive Theory of Self-Regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 248–287.
- Naskar, S. T., & Lindahl, J. M. M. (2025). Forty years of the theory of planned behavior: A bibliometric analysis (1985–2024). *Management Review Quarterly*.
- Roringkon, D. L., & Sarjito, A. (2021). Pemberdayaan Kaum Milenial sebagai Kader Bela Negara. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(7), 707–716.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan.
- Kaspersky. (2025). *Cybersecurity Report on Government Sector Threats (data serangan siber sektor publik)*.